

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024; dan
3. Isu-isu Aktual lainnya.
Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 18 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Plt. Sekretaris Jenderal);
3. Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak., CSFA. (Inspektur Jenderal);
4. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya);

5. Dr. Budi Sulistiyo, M.Si. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
6. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut);
7. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
8. Ir. Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan);
9. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
10. Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi., M.Si. (Kuasa Kepala Badan/Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
11. Frans Marganda Tambunan (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD);
12. Sigit Muhartono (Direktur Utama PT Perikanan Indonesia); dan
13. Arif Haendra (Direktur Utama PT Garam (Persero)).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 s.d. 10 November 2023, sebesar Rp5.105.074.479.869,00,00 (lima triliun seratus lima miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 80,29% dari Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.358.041.821.000,00 (enam triliun

tiga ratus lima puluh delapan miliar empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar dalam waktu 2 (dua) bulan melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebagaimana yang telah direncanakan.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk memilih mengabdikan diri di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di Badan Karantina Indonesia, khususnya untuk Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan memperhatikan aspek kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja, serta integritas dan moralitas agar kinerjanya optimal dan sesuai keahliannya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kemudahan mutasi/roling ASN yang sudah memenuhi syarat untuk pindah di internal Pusat ataupun pindah antar unit kerja Eselon I, agar kinerjanya optimal mengingat tidak sedikit ASN yang domisilinya jauh dengan keluarga.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Penangkapan Ikan Terukur serta mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada nelayan dan pelaku usaha, agar iklim usaha tetap kondusif dalam rangka meningkatkan nilai tukar nelayan bersama Komisi IV DPR RI.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi ruang bagi nelayan kecil (non pengusaha) tetap bisa menangkap ikan di atas 12 mill laut sesuai dengan kemampuannya serta tetap mendapatkan pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan budi daya lobster dalam negeri, mengingat sumber daya benih lobster di perairan Indonesia melimpah dan merupakan komoditas ekonomis yang dapat meningkatkan PNBPN dan ekonomi bangsa.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi bantuan Pemerintah Tahun 2023, dan sosialisasi rencana bantuan Pemerintah Tahun 2024 agar proses identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dapat

segera dilakukan sejak dini sehingga awal tahun 2024 bantuan Pemerintah dapat segera tersalurkan dengan tepat dan cepat.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian sampah plastik dan limbah B3 di pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan kampanye Bulan Cinta Laut (BCL) secara masif kepada masyarakat.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dan diskusi lebih lanjut terkait RUU Kelautan dengan Komisi IV DPR RI dalam rangka menjangkau saran dan masukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

G. Budisatrio Djiwandono
A-127